

# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Rahmat Nya sehingga penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diselesaikan. Penyusunan CaLK ini masih jauh dari kesempurnaan, dalam hal ini SKPD kami belum memiliki standar penyusunan CaLK yang baik. Harapan kami dapat memberikan hasil Catatan yang dapat menjadi dasar penyajian informasi Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah di masa yang akan datang.

Apabila ditemukan beberapa kesalahan maupun kekurangan kami mohon kritik dan sarannya sebagai bahan perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (per 31 Desember 2017) maupun di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam pembuatan, penyelesaian Catatan atas Laporan Keuangan ini. Akhirnya kami sampaikan CaLK Dinas Ketahanan Pangan Daerah untuk dijadikan informasi sebagai bagian dari bahan evaluasi keuangan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu di Tahun Anggaran 2017 (per 31 Desember 2017).

Batulicin, 31 Januari 2018

Kepala Dinas Ketahanan  
Pangan Daerah

**Drs. H. Rahmat, M. Pd**

NIP. 19611213 198703 1 016

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
LAPORAN KEUANGAN :	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. NERACA	
3. LAPORAN OPERASIONAL	
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I	Pendahuluan..... 1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD..... 1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 1
1.3	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan..... 3
1.4	Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan..... 4
BAB II	Iktishar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD..... 5
2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD..... 5
2.2	Faktor Penghambat dan Pendukung yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan..... 6
BAB III	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan..... 8
3.1	Komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran..... 8
3.1.1	Belanja..... 8
3.1.1.1	Belanja Operasi..... 9
3.1.1.1.1	Belanja Pegawai..... 10
3.1.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa..... 11
3.1.1.1.3	Belanja Hibah..... 11
3.1.1.2	Belanja Modal..... 12
3.1.1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin..... 13
3.1.1.2.2	Belanja Bangunan dan Gedung..... 13
3.1.1.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan..... 14
3.1.2	Surplus/Defisit..... 14

3.2	Komponen-komponen Neraca .....	15
3.2.1	Aset .....	15
3.2.1.1	Aset Lancar.....	16
3.2.1.2	Aset Tetap.....	16
3.2.1.2.1	Tanah.....	17
3.2.1.2.2	Peralatan dan Mesin.....	18
3.2.1.2.3	Gedung dan Bangunan .....	18
3.2.1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	18
3.2.1.2.5	Konstruksi dalam Pengerjaan .....	19
3.2.1.2.6	Akumulasi Penyusutan .....	19
3.2.3	Ekuitas.....	20
3.3	Komponen-komponen Laporan Operasional .....	21
3.3.1	Beban .....	21
3.3.1.1	Beban Operasi.....	22
3.3.1.1.1	Beban Pegawai .....	22
3.3.1.1.2	Beban Persediaan.....	23
3.3.1.1.3	Beban Jasa.....	23
3.3.1.1.4	Beban Pemeliharaan.....	23
3.3.1.1.5	Beban Perjalanan Dinas .....	24
3.3.1.1.6	Beban Hibah .....	24
3.3.1.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	24
3.3.1.1.8	Beban Lain-lain.....	24
3.3.2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	25
3.3.3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	25
3.3.4	Surplus/Defisit - LO.....	25
3.4	Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas .....	26
3.4.1	Ekuitas Awal.....	26
3.4.2	Surplus/Defisit -LO.....	26
3.4.3	Ekuitas Akhir .....	26
BAB IV	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan .....	27
4.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah.....	27
4.2	Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Daerah .....	30
4.3	Sumber Daya Manusia .....	31
4.4	Penentuan isu-isu Strategis.....	31

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Belanja Tahun Anggaran 2017 .....	5
Tabel 2.2	Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017.....	6
Tabel 2.3	Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 .....	6
Tabel 3.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi tahun 2017 dan 2016 .....	9
Tabel 3.1.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 dan 2016.....	10
Tabel 3.1.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 .....	10
Tabel 3.1.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 .....	11
Tabel 3.1.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal tahun 2017 .....	12
Tabel 3.1.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2017.....	13
Tabel 3.1.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2017 .....	14
Tabel 3.1.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan tahun 2017.....	14
Tabel 3.2.1	Aset Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2017 dan 2016 .....	15
Tabel 3.2.2	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap tahun 2017 .....	16
Tabel 3.2.3	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan tahun 2017 .....	19
Tabel 3.3.1	Realisasi Beban Operasi tahun 2017.....	22
Tabel 3.3.2	Realisasi Beban Pegawai tahun 2017 .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2017.....	5
Gambar 3.1.1	Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun Anggaran 2017.....	9
Gambar 3.1.2	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 .....	13
Gambar 3.2.1	Aset Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2017 .....	15



---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- 1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu serta hasil-hasil yang dicapai;

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara ;



- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai Pendapatan dan Belanja. Data informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran SKPD);
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- 10) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 11) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **1.3.1 Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari bagian keuangan SKPD. Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

##### **1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai Pendapatan dan Belanja. Data informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran SKPD.

##### **2) Neraca**

Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Denda, Piutang Retribusi, Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Kewajiban didasarkan pada Neraca SKPD.

##### **3) Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode berikutnya.

##### **4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode.

##### **5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan mengenai kondisi umum Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### **1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

**BAB II**      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**BAB III**     Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

Rinci dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 3.2 Neraca
- 3.3 Laporan Operasional
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

**Bab IV**     Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

**Bab V**      PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Gambaran realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

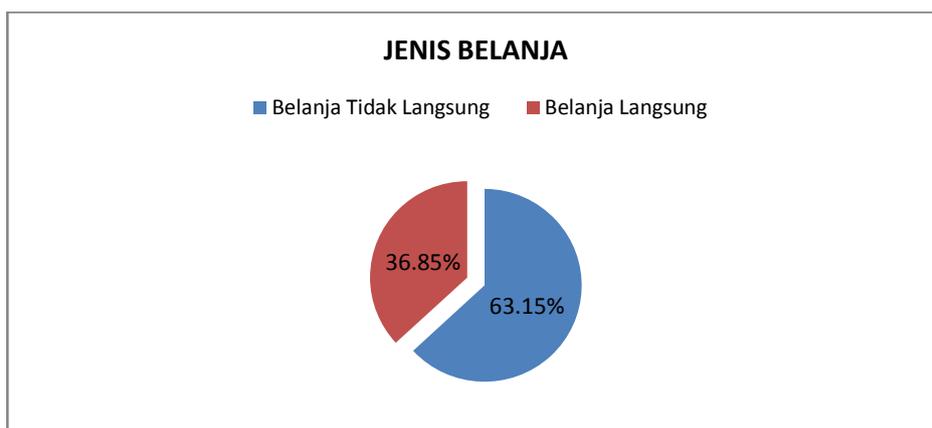
##### 2.1.1 Belanja

Tabel 2.1  
Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Tidak Langsung	1,887,426,034.00	1,695,340,856.00	89.82%	1,232,468,740.00
Belanja Langsung	1,129,794,000.00	989,353,707.00	87.57%	1,196,162,358.00
Jumlah	3,017,220,034.00	2,684,694,563.00	88.98%	2,428,631,098.00

Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp3,017,220,034.00 dan terealisasi sebesar Rp2,684,694,563.00 atau sebesar 88.98%.

Gambar 2.1  
Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Tahun Anggaran 2017



Realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp1,887,426,034.00 dan terealisasi sebesar Rp1,695,340,856.00 atau sebesar 89.82%.

Tabel 2.2  
Belanja Tidak Langsung  
Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Lebih / Kurang
Belanja Gaji dan Tunjangan	1,106,826,034.00	937,240,856.00	84.68%	169,585,178.00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	780,600,000.00	758,100,000.00	97.12%	22,500,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,887,426,034.00</b>	<b>1,695,340,856.00</b>	<b>89.82%</b>	<b>192,085,178.00</b>

**b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp429,794,000.00 dan terealisasi sebesar Rp989,353,707.00 atau sebesar 230.19%. Tabel 2.2 menjelaskan komponen dari Belanja Langsung yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2.3  
Belanja Langsung  
Tahun Anggaran 2017

Jenis Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Pegawai	408,770,000.00	393,670,000.00	96.31%	435,350,000.00
Belanja Barang Jasa	21,024,000.00	595,683,707.00	2833.35%	552,082,358.00
Belanja Modal	0.00	0.00	0.00%	208,730,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>429,794,000.00</b>	<b>989,353,707.00</b>	<b>230.19%</b>	<b>1,196,162,358.00</b>



## **2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dinas Ketahanan Pangan Daerah sejauh ini telah menjalankan Tupoksinya dengan semaksimal mungkin untuk mendukung sukses dan tercapainya rencana kerja kepala daerah. Namun demikian untuk dapat mencapai kinerja kerja yang memuaskan tentunya juga harus didukung dengan sumber daya yang juga sesuai dan tepat, terutama Sumber Daya Manusia sebagai unsur utamanya. Dinas Ketahanan Pangan Daerah dengan terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya Pegawai Negeri Sipil teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah belum maksimal sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.

### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##### Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, dimana Pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran; Pos kegiatan operasional pendapatan dan beban terdapat dalam Laporan Operasional; dan Pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca sedangkan Pos perubahan ekuitas terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas;

#### 3.1 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya Tahun Anggaran 2017.

	<u>Anggaran TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016 (Rp)</u>
<b>3.1.1 Belanja</b>	<b>3,017,220,034.00</b>	<b>2,684,694,563.00</b>	<b>2,428,631,098.00</b>

Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp 2,684,694,563.00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 2016, maka terjadi penurunan sebesar Rp 256,063,465 atau sebesar 10,5%.

Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada gambar 3.1.1



Gambar 3.1.1  
Realisasi Belanja Dinas Pangan Daerah  
Tahun Anggaran 2017

	<u>Anggaran TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016 (Rp)</u>
<b>3.1.1.1 Belanja Operasi</b>	<b>3,017,220,034.00</b>	<b>2,357,551,680.00</b>	<b>2,219,901,098.00</b>

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran Belanja Operasi Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 0.00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2017, maka terjadi kenaikan pengeluaran Belanja Operasi sebesar Rp 137.650.582 atau sebesar 6,2%. Rincian pos Belanja Operasi diperlihatkan pada Tabel 3.1.1 berikut ini.

Tabel 3.1.1  
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi  
Tahun 2017 dan 2017

Jenis Belanja	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
Belanja Pegawai	1,887,426,034.00	1,491,239,515.00	79.01%	1,232,468,740.00
Belanja Barang dan Jasa	1,129,794,000.00	8,666,312,165.00	767.07%	987,432,358.00
Barang Hibah	0.00	0.00	0.00%	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>3,017,220,034.00</b>	<b>10,157,551,680.00</b>	<b>336.65%</b>	<b>2,219,901,098.00</b>

	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)
<b>3.1.1.1.1 Belanja Pegawai</b>	<b>1,887,426,034.00</b>	<b>1,491,239,515.00</b>	<b>1,232,468,740.00</b>

Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2017 sebesar Rp 1,887,426,034.00 dan terealisasi sebesar Rp 1,491,239,515.00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2016, maka terjadi peningkatan sebesar Rp 258.770.775 atau sebesar 21%.

Tabel 3.1.2  
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% dari Total	% dari Anggaran	Realisasi 2016 (Rp)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
1	Gaji dan Tunjangan	1,106,826,034.00	868,739,515.00	58.26%	78.49%	748,420,740.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	780,600,000.00	622,500,000.00	41.74%	79.75%	484,048,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,887,426,034.00</b>	<b>1,491,239,515.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>79.01%</b>	<b>1,232,468,740.00</b>

Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 berikut.

Tabel 3.1.3  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% dari Total	% dari Anggaran	Realisasi 2016 (Rp)
<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
	Gaji dan Tunjangan	1,106,826,034.00	868,739,515.00	58.26%	78.49%	748,420,740.00
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	836,997,700.00	688,903,567.00	46.20%	82.31%	590,389,220.00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	80,512,449.00	63,205,710.00	4.24%	78.50%	54,551,646.00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	113,004,000.00	61,360,000.00	4.11%	54.30%	44,460,000.00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	21,651,000.00	17,765,000.00	1.19%	82.05%	21,435,000.00
5	Belanja Tunjangan Beras	53,431,476.00	37,368,720.00	2.51%	69.94%	35,630,640.00
6	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1,044,409.00	128,034.00	0.01%	12.26%	1,944,923.00
7	Belanja Pembulatan Gaji	185,000.00	8,484.00	0.00%	4.59%	9,311.00
	Tambahan Penghasilan PNS	780,600,000.00	622,500,000.00	41.74%	79.75%	484,048,000.00
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	780,600,000.00	622,500,000.00	41.74%	79.75%	484,048,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>3,774,852,068.00</b>	<b>2,982,479,030.00</b>	<b>200.00%</b>	<b>79.01%</b>	<b>2,464,937,480.00</b>



Dari Tabel 3.1.3 dapat dijelaskan bahwa rincian pengeluaran terbesar terjadi pada Gaji Pokok PNS/Uang Representatif sebesar Rp 688,903,567.00 dan pengeluaran terendah pada Pembulatan Gaji sebesar Rp 8,484.00.

	<b>Anggaran TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1,129,794,000.00</b>	<b>866,312,165.00</b>	<b>987,432,358.00</b>

Anggaran Belanja Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 sebesar Rp1,129,794,000.00 dan terealisasi sebesar Rp866,312,165.00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2016, maka terjadi penurunan sebesar Rp 121,120,193 atau sebesar 12,3%.

Tabel 3.1.4 menjelaskan jumlah anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 3.1.4  
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% dari Jumlah	% dari Anggaran	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	91,159,000.00	66,320,500.00	7.66%	72.75%	61,689,500.00
2	Belanja Bahan/Material	134,430,000.00	110,540,000.00	12.76%	82.23%	145,915,000.00
3	Belanja Jasa Kantor	34,290,000.00	24,543,281.00	2.83%	71.58%	33,455,458.00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,000,000.00	2,000,000.00	0.23%	66.67%	17,269,000.00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,615,000.00	6,615,000.00	0.76%	86.87%	5,500,000.00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0.00	0.00	0.00%	0.00%	30,000,000.00
7	Belanja Sewa Sama Mobilitas	18,500,000.00	12,300,000.00	1.42%	0.00%	19,200,000.00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,200,000.00	34,200,000.00	3.95%	0.00%	850,000.00
9	Belanja Makanan dan Minuman	22,280,000.00	15,560,000.00	1.80%	69.84%	18,900,000.00
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	10,000,000.00
11	Belanja Perjalanan Dinas	310,350,000.00	201,733,384.00	23.29%	65.00%	207,003,400.00
12	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	3,500,000.00	2,500,000.00	0.29%	71.43%	1,000,000.00
13	Belanja Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.58%	100.00%	5.60
14	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5,400,000.00	4,600,000.00	0.53%	85.19%	7,500,000.00
15	Honorarium PNS	70,270,000.00	58,850,000.00	6.79%	83.75%	69,600,000.00
16	Honorarium Non PNS	338,500,000.00	287,150,000.00	33.15%	84.83%	354,950,000.00
17	Belanja Jasa*)	35,300,000.00	34,400,000.00	3.97%	97.45%	6,500,000.00



Jumlah	1,129,794,000.00	866,312,165.00	100.00%	76.68%	989,332,363.60
--------	------------------	----------------	---------	--------	----------------

	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)
<b>3.1.1.1.3 Belanja Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anggaran Belanja Hibah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)
<b>3.1.1.2 Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.730.000,00</b>

Anggaran Belanja Modal Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2016 maka terjadi penurunan sebesar Rp 208,730,000.00 atau 100%.

Tabel 3.1.5  
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	0.00%	-
2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	0.00%	208,730,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>208,730,000.00</b>



Gambar 3.1.2  
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017

	Anggaran TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2017 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)
<b>3.1.1.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp 0,00% dan terealisasi sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2016 maka terjadi penurunan sebesar Rp 0.00 atau sebesar 100%

Tabel 3.1.6  
Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin  
Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	% dari	Realisasi
		2017 (Rp)	2017 (Rp)	Jumlah	Anggaran	2016 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
1	Belanja Modal Peralatan-Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pemeliharaan Tanaman	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>



	<u>Anggaran TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016 (Rp)</u>
<b>3.1.1.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,730,000.00</b>

Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2016 maka terjadi penurunan sebesar Rp 208,730,000.00 atau 100%. Rincian belanja gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel 3.1.7 berikut :

Tabel 3.1.7  
Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00%	208,730,000.00
2	Belanja Bangunan dan Gedung-Pengadaan Bangunan Gudang	-	-	0.00%	208,730,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>417,460,000.00</b>

	<u>Anggaran TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016 (Rp)</u>
<b>3.1.1.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anggaran Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

Tabel 3.1.8  
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Tahun Anggaran 2017



No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air	-	-	0.00%	-
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Tawaran	-	-	0.00%	-
<b>Jumlah</b>		-	-	0.00%	-

	<u>Anggaran TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2017 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016 (Rp)</u>
<b>3.1.2 Surplus/Defisit</b>	<b>(3,017,220,034.00)</b>	<b>(2.357,551680,00)</b>	<b>(2.428.631,093.00)</b>

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menganggarkan Defisit Anggaran sebesar Rp 3,017,551,680.00 namun defisit anggaran terjadi sebesar Rp 2,357,557,680.00, Jika dibandingkan dengan Defisit Anggaran yang terjadi di Tahun 2016, maka terjadi peningkatan Defisit Anggaran sebesar Rp 71.073.418 dan Terealisasi 2,9 %.



### 3.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah yang tercermin dalam beban dan surplus/deficit operasional.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2017 dilaksanakan dengan pendekatan antara LRA ke LO. Inventarisasi akun-akun unsur pembentuk LO dilakukan dari LRA dengan tambahan formula, sehingga pembentukan LO sebagai berikut:

#### 1. Beban

- a. Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (*accrued*), nilai pada Tahun 2017 dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Beban} &= \text{Nilai Belanja pada LRA} \\ & (+) \text{ Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2016} \\ & (+) \text{ Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2017} \\ & (-) \text{ Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017} \\ & (-) \text{ Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2016} \end{aligned}$$

- b. Beban persediaan dihitung berdasarkan saldo persediaan per 31 Desember 2016 ditambah belanja persediaan pada LRA Tahun 2017 dikurangi saldo persediaan per 31 Desember 2017.
- c. Beban penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud dihitung berdasarkan umur piutang dan masa manfaat aset tetap atau aset tak berwujud sesuai kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.
- d. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut diatas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Beban.

	<b>Realisasi TA 2017</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016</b> <b>(Rp)</b>
<b>3.3.1 Beban</b>	<b>2.740.424.025,00</b>	<b>2.503.318.968,34</b>

Beban adalah kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban - LO Dinas Ketahanan Pangan Daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp 2.740.424.025,00 yang terdiri dari beban operasi sebagai



berikut:

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1 Beban Operasi</b>	<b>2.740.424.025,00</b>	<b>2.219.901.098,00</b>

Beban Operasi Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Belanja Operasi pada LRA tidak terdapat perbedaan. Rincian beban operasi dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.1  
Realisasi Beban Operasi  
Tahun 2017 dan 2016

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pegawai	1,695,340,856.00	1,232,468,740.00	462,872,116.00
2	Beban Hibah	9,800,000.00	13,100,000.00	(3,300,000.00)
3	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00
4	Beban Persediaan	190,986,000.00	234,504,500.00	(43,518,500.00)
5	Beban Jasa	548,264,089.00	514,555,458.00	33,708,631.00
6	Beban Pemeliharaan	6,060,000.00	18,269,000.00	(12,209,000.00)
7	Beban Perjalanan Dinas	289,973,080.00	207,003,400.00	82,969,680.00
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.00	0.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2,740,424,025.00</b>	<b>2,219,901,098.00</b>	<b>520,522,927.00</b>

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.1 Beban Pegawai</b>	<b>3.757.567.113,00</b>	<b>1.232.468.740,00</b>

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 3.3.2  
Realisasi Beban Pegawai  
Tahun 2017



No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2,077,230,113.00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	1,680,337,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>3,757,567,113.00</b>

Beban pegawai secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja pegawai TA 2017 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 3.757.567.133,00 .

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.2 Beban Persediaan</b>	<b>190.986.000,00</b>	<b>234.504.500,00</b>

Beban persediaan Tahun 2017 sebesar Rp190.986.000,00. Belanja Barang Jasa pada LRA yang dikategorikan sebagai persediaan, menjadi salah satu komponen penambah Beban Persediaan tahun berjalan.

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.3 Beban Jasa</b>	<b>548.264.089,00</b>	<b>514.555.458,00</b>

Beban Jasa merupakan beban Dinas Ketahanan Pangan Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Beban jasa secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja jasa Tahun 2017 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp548.264.089,00 .

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.4 Beban Pemeliharaan</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>18.269.000,00</b>



Beban Pemeliharaan merupakan beban Dinas Ketahanan Pangan Daerah yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Dinas Ketahanan Pangan Daerah dan bersifat tidak menambah nilai aset tetap. Beban Pemeliharaan Tahun 2017 sebesar Rp6.060.000,00.

Beban Beban Pemeliharaan Tahun 2017 sebesar Rp6.060.000,00. Beban Pemeliharaan secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja pemeliharaan Tahun 2017 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp6.060.000,00 .

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.5 Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>289.973.080,00</b>	<b>207.003.400,00</b>

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 sebesar Rp289.973.080,00. Beban perjalanan dinas secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja perjalanan dinas TA 2017 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp289.973.080,00.

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.6 Beban Hibah</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>

Beban Hibah Tahun 2017 sebesar Rp9.800.000,00. Beban Hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja Hibah Tahun 2017

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.3.1.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud Tahun 2017 sebesar Rp0,00 .



---

	<u>Realisasi TA 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016</u> <u>(Rp)</u>
<b>3.3.1.1.8 Beban lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beban lain-lain Tahun 2017 sebesar Rp0,00. Beban Hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan belanja lain-lain Tahun 2017

	<u>Realisasi TA 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016</u> <u>(Rp)</u>
<b>3.3.2 Surplus/Desfisit dari Kegiatan Operasional</b>	<b>(2.740.424.025,00)</b>	<b>(2.503.310.986,34)</b>

Surplus/Desfisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 sebesar(Rp2.740.424.025,00).

	<u>Realisasi TA 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016</u> <u>(Rp)</u>
<b>3.3.3 Surplus/Desfisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>

Surplus/Desfisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 sebesar Rp0.00

	<u>Realisasi TA 2017</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2016</u> <u>(Rp)</u>
<b>3.3.4 Surplus/Defisit – LO</b>	<b>(2.7240.424.025,00)</b>	<b>(2.503.318.968,34)</b>

Surplus/Defisit - LO Tahun 2017 sebesar Rp( 2.7240.424.025,00).



### 3.4 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun operasional.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>2.927.065.609,69</b>	<b>3.001.753.480,67</b>

Saldo awal ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp2.927.065.609,69 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016 sesuai dengan Neraca audited 2016.

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.4.2 Surplus / Defisit – LO</b>	<b>(2.740.424.025,00)</b>	<b>(2.503318.968,34)</b>

Surplus/Defisit LO sebesar Rp(2.740.424.025,00) merupakan defisit atas kegiatan operasional Dinas Ketahanan Pangan Daerah tahun 2017 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas Ketahanan Pangan Daerah tahun 2017.

	<b>Realisasi TA 2017 (Rp)</b>	<b>Realisasi TA 2016 (Rp)</b>
<b>3.4.3 Ekuitas Akhir</b>	<b>3.202.292.578,27</b>	<b>2.927.065.609,69</b>

Jumlah ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp3.202.292.578,27 menjadi nilai ekuitas di neraca.

### 3.2 KOMPONEN-KOMPONEN NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal 31 Desember 2017.

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1 Aset</b>	<b>3.202.292.578,91</b>	<b>2.927.065.609,69</b>

Jumlah Aset milik Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.202.292.578,91. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.927.065.609,69, maka terjadi peningkatan sebesar Rp 275.226.969,22 atau 13,5%. Aset Per 31 Desember 2017 tampak pada Tabel 3.2.1 dan Gambar 3.2.1.



Gambar 3.2.1  
Aset Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Per 31 Desember 2017

Tabel 3.2.1  
Aset Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Lancar	0,00	0,00
Aset Tetap	3.202.292.578,91	2.927.065.609,69
Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.202.292.578,91</b>	<b>2.927.065.609,69</b>



Penjelasan dari ketiga unsur Aset sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.1.1 Persediaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Persediaan merupakan pos untuk mencatat perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>3.202.292.578,91</b>	<b>2.927.065.609,69</b>

Tabel 3.2.2  
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap  
Dinas Ketahanan Pangan Daerah  
Tahun 2017



No	URAIAN	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2016	15,000,000.00	713,468,145.28	3,040,995,397.64	47,887,181.00	47,887,181.00	0.00	3,865,237,904.92
2	Koreksi Kurang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Koreksi Tambah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>Saldo Awal 2016 (1 - 2 + 3)</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>713,468,145.28</b>	<b>3,040,995,397.64</b>	<b>47,887,181.00</b>	<b>47,887,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,865,237,904.92</b>
5	PENAMBAHAN							
6	Belanja Modal 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Belanja Pegawai 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Belanja Barang Jasa 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Penambahan KDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Berubah Kondisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Koreksi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Mutasi Tambah	0.00	477,057,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	477,057,029.56
15	<b>Jumlah Penambahan (6 s.d. 14)</b>	<b>0.00</b>	<b>477,057,029.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,057,029.56</b>
16	PENGURANGAN							
17	Pengurangan KDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Reklas ke Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Persediaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Koreksi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Berubah Kondisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Ekstra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Mutasi antar SKPD	0.00	38,330,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	38,330,060.34
23	<b>Jumlah Pengurangan (17 s.d. 21)</b>	<b>0.00</b>	<b>38,330,060.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,330,060.34</b>
24	<b>Saldo per 31 Desember 2017 (4 + 15 - 23)</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>1,152,195,114.50</b>	<b>3,040,995,397.64</b>	<b>47,887,181.00</b>	<b>47,887,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,303,964,874.14</b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.202.292.578,91. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.927.065.609,69 terjadi peningkatan sebesar Rp27.522.696,22 atau 13,5%.

Penjelasan Aset Tetap dapat dilihat pada rincian berikut ini:



---

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.2.1 Tanah</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

total saldo Aset Tanah di neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp15.000.000,00 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Tanah per 1 Januari 2017. Saldo Tanah per 1 Januari 2017 sebesar Rp15.000.000,00. Tanah tidak ada penambahan atau pengurangan pada Tahun 2017

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin</b>	<b>988.695.114,50</b>	<b>713.468.145,28</b>

Saldo Peralatan dan Mesin di Neraca per 1 Januari 2017 sebesar Rp988.695.114,50 dan tahun 2017 tidak ada penambahan atau pengurangan peralatan dan mesin.

Sehingga total saldo Aset Peralatan dan Mesin di neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp988.695.114,50 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2017.

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.040.995.397,00</b>	<b>3.040.995.397,00</b>

Saldo Gedung dan Bangunan di Neraca per 1 Januari 2017 sebesar Rp3.040.995.397,00. Sehingga total saldo Aset Gedung dan Bangunan di neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.040.995.397,00 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2017.

	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)
<b>3.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>47.887.181,00</b>	<b>47.887.181,00</b>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca per 1 Januari 2017 sebesar Rp47.887.181,00. Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada penambahan atau pengurangan pada Tahun 2017.



Sehingga total saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.887.181,00 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 1 Januari 2017.

	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>
<b>3.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan di Neraca per 1 Januari 2017 sebesar Rp0.00. Konstruksi Dalam Pengerjaan ada pengurangan pada Tahun 2016 sebesar Rp0.00. Sehingga total saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di neraca per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0.00 yang akan menjadi Saldo Awal Neraca Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 1 Januari 2017.

	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>
<b>3.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(0.00 )</b>	<b>(0.00)</b>

Seluruh nilai aset tetap kecuali tanah diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 dihitung dari saldo aset tetap per 31 Desember 2016 sesuai masa manfaat dan tarif penyusutan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus.
- 2) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun dan nilai residu.
- 3) Nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan.



	<b>31 Desember 2017</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>
<b>3.2.3 Ekuitas</b>	<b>2.740424.025,00</b>	<b>2.428.631.098,00</b>

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ekuitas Dana Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.740424.025,00 dan Rp2.428.631.098,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp311.792.927,00 atau 9,72%.

## BAB IV

### INFORMASI NON KEUANGAN

#### 4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah sesuai Peraturan Daerah (Perda) tersebut di atas terdiri dari :

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari:

1. Kepala Dinas, bertugas membantu Bupati Tanah Bumbu dalam menentukan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinir, membina dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas. Uraian tugas dimaksud adalah :
  - a. Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
  - e. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
  - f. Melaksanakan administrasi Perdinasan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - h. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Dinas;
  - i. Melaksanakan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketatausahaan



- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - b. Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ;
  - c. Membina peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
  - d. Membina pengembangan penganekaragaman produk pangan;
  - e. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
  - f. Melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat;
  - g. Mengembangkan dan mengatur cadangan pangan pokok tertentu kabupaten;
  - h. Melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
  - i. Melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten;
  - j. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
  - k. Melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan;
  - l. Melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten;
  - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - n. Melaksanakan koordinasi ketersediaan dan kerawanan pangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kasi Distribusi Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi pangan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :



- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan distribusi pangan;
  - b. Melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten;
  - c. Melaksanakan pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten;
  - d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
  - e. Memantau informasi harga di kabupaten;
  - f. Melaksanakan pemantauan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten;
  - g. Melaksanakan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten;
  - h. Melaksanakan pengembangan "trust fund" di kabupaten;
  - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - j. Melaksanakan koordinasi distribusi pangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Kasi Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
  - c. Melaksanakan peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
  - e. Melaksanakan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
  - f. Melaksanakan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
  - h. Melaksanakan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah kabupaten;



- i. Melaksanakan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten;
- j. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten;
- k. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan koordinasi konsumsi dan keamanan pangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan fungsional

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

#### 4.2 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

**“ Terwujudnya Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan lokal yang dapat diakses baik fisik maupun ekonomi secara berkelanjutan ”.**

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga

#### 4.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Daerah kabupaten Tanah Bumbu untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 18 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 4 orang kepala seksi dan 2 orang kepala sub bagian serta 7 orang sebagai pelaksana atau staf dan 1 orang Analis Pangan. Dalam



melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah juga dibantu oleh 2 orang PTT dan 4 orang Pengelola gudang (Non PNS).

#### 4.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
2. Mengembangkan pembangunan lumbung pangan Masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan lokal.
4. Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.
5. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.